



PENGUATAN STRATEGI PERTAHANAN LAUT MELALUI PENINGKATAN KESIAPAN PRAJURIT PENGAWAK KAPAL PERANG REPUBLIK INDONESIA

SEA DEFENSE STRATEGY STRENGTHENING THROUGH IMPROVING THE READINESS OF INDONESIAN NAVAL VESSEL SOLDIER

Endah Palupi¹, Edi Suhardono², Ernalem Bangun³

Program Studi Strategi Pertahanan Laut

Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan

1.endahedypalupi@gmail.com, 2.edisuhard@yahoo.co.id, 3 ernabangun@gmail.com

Abstrak– Strategi Pertahanan Laut dalam lingkup penangkalan salah satunya dengan menghadirkan kekuatan TNI AL di wilayah laut. Hal ini menuntut kesiapan Kapal Republik Indonesia (KRI) yang meliputi kesiapan material platform dan personelnya. Satuan kerja di KRI yang berbeda dengan kondisi di satuan di darat (pendirat) pada umumnya memerlukan penyesuaian diri dari masing-masing personel dan rekayasa kesehatan personel agar dapat terhindar dari gangguan kesehatan atau penyakit yang dapat mengganggu kinerjanya. Permasalahan penelitian yaitu tentang implementasi urikkes prajurit KRI di Diskes Koarmada I untuk kesiapan dalam rangka mendukung tugas pertahanan, faktor-faktor yang memengaruhi dan strategi terbaik yang dilakukan. Tujuan penelitian untuk menganalisa implementasi pemeriksaan kesehatan prajurit pengawak KRI di Diskes Koarmada I, faktor-faktor apa yang memengaruhi dan upaya apa yang dilakukan guna mendapat hasil pelaksanaan urikkes prajurit pengawak KRI yang optimal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisa menggunakan teori implementasi kebijakan dari George Edward III. Data diperoleh dari para informan yang terkait dengan penyelenggaraan urikkes untuk prajurit pengawak KRI di Koarmada I yang selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan urikkes prajurit pengawak KRI sudah terlaksana namun belum optimal. Upaya yang dilakukan adalah berkoordinasi di tahap perencanaan, perlu dibuat kebijakan yang mewajibkan prajurit KRI melaksanakan urikkes tanpa terkecuali (dinas/pendidikan) dan memberikan vaksinasi Covid-19 sesuai persyaratan kepada prajurit KRI. Sehingga prajurit KRI dapat bertugas secara optimal mendukung pertahanan laut negara.

Kata Kunci: George Edward III, Kesiapan Kapal perang Republik Indonesia, Prajurit Kapal perang Republik Indonesia, Strategi pertahanan, Uji dan Pemeriksaan Kesehatan



Abstract– *One of the sea defense strategies in the scope of deterrence is by presenting the Indonesian Navy force in the sea. This demands the readiness of the Naval Vessel Republic of Indonesia (KRI) includes the platform material readiness and its personnel. The KRI unit is generally different from the land unit makes it difficult the crew and need the health manipulation to avoid health problems or diseases that can interfere with their performance. Research errors regarding the implementation of the KRI soldier medical check up at the Koarmada I Health office for readiness in order to support the defense task, the factors that influence and what is the effort supposed to do. The aim of the study was to analyze the implementation of the KRI escort soldiers checks at the Koarmada I Health Office what factors influenced and the best strategies implemented to obtain optimal results of the implementation of the KRI escort soldier medical check up. This study uses a qualitative method. The analysis uses the theory of policy implementation from George Edward III. Data were obtained from informants related to the implementation of medical check up for KRI soldiers in Koarmada which were then analyzed using qualitative. The results showed that the implementation of urikkes for KRI soldiers was not optimal. Efforts are being made to coordinate at the planning stage, it is necessary to make a policy that requires KRI soldiers to carry out urikkes without exception and provide Covid-19 vaccinations. So that soldiers can serve optimally.*

Keywords: *Defense strategy, George Edward III, Indonesian Naval Vessel readiness, Indonesian Naval Vessel soldiers, Medical check-up*

Pendahuluan

Sistem Pertahanan Semesta menempatkan TNI sebagai komponen utama untuk menghadapi ancaman militer. TNI AL adalah bagian integral dari TNI berperan sebagai komponen utama pertahanan negara matra laut. TNI AL harus memiliki kekuatan yang besar dan memadai meliputi armada, komando lintas laut militer dan korps marinir. Hal tersebut disampaikan Robert Art dalam Supriyatno (2014) yang menyebutkan bahwa pertahanan akan selalu merujuk pada penggunaan kekuatan militer untuk menghentikan ancaman atau serangan, atau meminimalisir akibat suatu serangan yang telah direncanakan.

Armada RI yang bertugas menyelenggarakan opskamla selain dituntut harus mampu mengatasi berbagai bentuk tantangan yang makin kompleks dan dinamis juga harus selalu hadir untuk melindungi lingkungan dan



sumber daya laut, menjaga keamanan, menjamin keselamatan dan mempertahankan kedaulatan negara di laut (Margono, 2019).

Sepanjang tahun Koarmada I menggelar operasi keamanan laut, sehingga untuk senantiasa mendapatkan kemampuan militer yang terpelihara maksimal Koarmada I harus membina kesiapan operasional setiap unsur. Kemampuan tersebut meliputi alutsista yang diawaki, seperti Kapal perang Republik Indonesia (KRI) maupun pengawak atau personel yang handal. KRI senantiasa dipersiapkan agar kemampuan kesiapsiagaan tempur (*combat readiness*) yang tinggi. Kesiapan KRI dalam beroperasi antara lain kesiapan teknis bidang *platform* (material), bidang Sewaco (*sensor weapon and command*), kesiapan suku cadang (*On Board Spare*) dan kesiapan prajurit pengawak KRI.

Bagi TNI AL, kondisi kesehatan personelnnya yang prima, tangguh dan dapat diandalkan menentukan kemampuan dan kualitas sumber daya yang tinggi dalam setiap pelaksanaan tugas TNI. Prajurit adalah sumber daya manusia profesional yang selalu dekat dengan risiko yang mempengaruhi kondisi kesehatan mereka, seperti cedera minor, cacat, dan kehilangan nyawa (Ma'arif, 2015). Demikian pula personel Koarmada I yang berdinasi sebagai pengawak KRI. Kondisi kesehatan prajurit KRI berpengaruh besar terhadap produktifitas dan kapasitas kerjanya. Terutama personel yang melakukan opskamla dan latihan peperangan di laut.

Lingkungan kerja di KRI sangat berbeda dibandingkan dengan lingkungan kerja di darat. Bentuk ruangan kerja dan akomodasi di KRI terbatas. Selain itu pengawak menempati ruangan yang berdekatan dengan gudang amonisi dan bahan bakar. Ditambah lagi dengan kondisi dan cuaca di laut yang fluktuatif. Akibatnya tingkat resiko dan beban kerja menjadi tinggi,



karena menuntut kesiagaan dan kewaspadaan selama bekerja untuk menghindari kecelakaan kerja. (Adriyanto & Muchlis, 2017).

Saat beroperasi KRI, pengawak secara *teamwork* berada pada kedudukan tugas dan fungsi masing-masing. Selama 12 jam atau 720 menit adalah waktu bekerja dalam satu hari di KRI dan berlaku untuk seluruh pengawak KRI. operasi dan perang di laut menuntut sikap tegas dan tidak ragu-ragu dalam bertindak memerlukan energi besar sehingga sangat melelahkan. Pertempuran di laut diawali dengan pengamatan dan patroli yang lama, kemudian diikuti aksi penembakan baik rudal maupun meriam yang sangat cepat. Begitu pula OMSP di laut juga memerlukan karakteristik yang sama. Pada kapal perang ukuran besar, keterbatasan terhadap cuaca dan kondisi laut juga tetap berlaku. Termasuk juga ketika di pelabuhan, kapal memerlukan tingkat pengawasan untuk memastikan keamanan material dan ABK kapal. (Rizanny, n.d.).

Kondisi-kondisi tadi membuat prajurit KRI rentan dengan penyakit yang dapat mengganggu kinerjanya. Selain membutuhkan pemeriksaan kesehatan secara berkala juga pentingnya pemeliharaan kesehatan agar mendapatkan kondisi fisik dan stamina tubuh yang prima untuk menunjang aktivitasnya.

Pemeriksaan Kesehatan prajurit pengawak KRI Koarmada I diselenggarakan di Dinas Kesehatan (Diskes) Koarmada I sebagai unsur pelaksana pusat Kotama Koarmada I yang berkewajiban mendukung tugas pokok Koarmada I bidang Kesehatan (Prokera, 2020). Pemeriksaan kesehatan prajurit pengawak KRI dilaksanakan secara berkala di Diskes Koarmada I dan di RS TNI AL dr. Mintohardjo sesuai dengan Perkasal Nomor 6 tahun 2017. Tujuannya untuk mendeteksi secara dini gejala penyakit ataupun kelainan kondisi fisik lainnya yang dapat mengakibatkan tugas pokok

menjadi tidak optimal. Penyakit dan gejala penyakit yang diketemukan diidap oleh personel akan diobati dan diterapi sampai tercapai kondisi prajurit yang siap digunakan kembali atau ditugaskan di darat (pendirat).

Hasil evaluasi terapi dan pengobatan menentukan kemampuan (*ability*) pengawak KRI tetap berdinam di KRI atau di darat, seperti ditampilkan di tabel berikut:

Tabel 1. Rekomendasi Prajurit Pengawak KRI berdasarkan Hasil Urrikes di Diskes Koarmada I

Sta-kes	Jumlah			Rekomendasi ke Pendirat		
	2018 (org)	2019 (org)	2020 (org)	2018 (org)	2019 (org)	2020 (org)
IIP	43	31	80	43	22	45
IIP	3	3	4	-	-	-

Sumber: diolah peneliti, 2020.

Kondisi ini dapat menyebabkan kekurangan pengawak KRI sementara pimpinan TNI AL menegaskan untuk memenuhi awak KRI minimal sebesar 90% dari kebutuhan atau dari Daftar Susunan Personel yang ditetapkan oleh TNI AL (Margono, 2019).

Dari uraian di atas maka permasalahan yang menarik untuk diteliti dan dianalisa adalah bagaimana upaya Diskes Koarmada I dalam meningkatkan kesiapan prajurit pengawak KRI Koarmada I sebagai penguatan strategi pertahanan laut. Berdasarkan data-data yang digali dari narasumber digunakan teori implementasi kebijakan publik dari George Edward III sebagai landasan untuk menganalisa.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan kerangka analisis implementasi kebijakan publik. Peneliti



menempatkan teori pada analisa data yang diperoleh sehingga tidak benar-benar kualitatif. Ini disebut juga kuasi kualitatif atau desain kualitatif semu. Artinya, desain ini dipengaruhi oleh tradisi kuantitatif, terutama dalam menempatkan teori pada data yang diperolehnya (Bungin, 2008). Penelitian ini berfokus melihat upaya-upaya dalam mewujudkan program pemeriksaan kesehatan yang optimal untuk prajurit KRI di Koarmada I. Kegiatan pemeriksaan Kesehatan dalam pelaksanaannya disebut juga uji pemeriksaan kesehatan (urikkes).

Data diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), melakukan observasi dan studi dokumentasi. Tujuan wawancara tersebut untuk saling menyelami pandangan/pikiran tentang sesuatu yang menjadi objek penelitian dan memperoleh data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terencana-tidak terstruktur yaitu wawancara yang disusun dengan rencana (*schedule*), tetapi tidak menggunakan format dan aturan yang baku (Yusuf, 2019).

Pada observasi, dilakukan pengamatan langsung pada objek penelitian yaitu kegiatan urikkes dan tindak lanjutnya di lokasi penelitian. Sedangkan studi dokumentasi yaitu menganalisa dokumen terkait penelitian ini antara lain surat perintah Pangkoarmada I tentang pelaksanaan urikkes, data prajurit Koarmada I yang melaksanakan urikkes, data tindak lanjut hasil urikkes, data penyakit kronis, dan buku regulasi terkait lainnya.

Pengujian keabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi dan bahan referensi. Creswell (2014, p. 191) mengatakan, melakukan triangulasi sumber-sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber tersebut dan menggunakannya adalah untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren. Tema-tema yang dibangun berdasarkan sejumlah sumber data atau perspektif dari partisipan



akan menambah validitas penelitian. Triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi teknik pengumpulan data. Sedangkan bahan referensi melengkapi penelitian berupa foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya (Sugiyono, 2007).

Analisis data interaktif yang digunakan peneliti adalah model interaktif yang terdiri dari : kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*) (Miles et al., 2018).

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum

Diskes Koarmada I adalah unsur pelaksana pusat dalam struktur organisasi Koarmada I yang berkewajiban mendukung tugas pokok Koarmada I bidang kesehatan. Lokasinya berada di Markas Komando Armada I di jalan Gunung Sahari No. 67 Jakarta Pusat. Diskes Koarmada I bertugas untuk melaksanakan pembinaan kesehatan yang meliputi dukungan kesehatan, pelayanan dan penunjang kesehatan di lingkungan Koarmada I, serta pembinaan teknis satuan kesehatan KRI di lingkungan Koarmada I.

Sasaran pembinaan kesehatan Koarmada I secara umum adalah:

- a. Terwujudnya dukungan kesehatan yang handal
- b. Tercapainya pelayanan kesehatan yang profesional
- c. Meningkatnya pola hidup bersih dan sehat bagi prajurit Koarmada I beserta keluarga
- d. Terwujudnya pembinaan sumber daya kesehatan secara transparan dan akuntabel.



Implementasi urikkes prajurit pengawak KRI di Diskes Koarmada I

Hasil analisa menggunakan teori George Edward III adalah menemukan jawaban atau sintesa pada tiap-tiap faktor implementasi kebijakan. George Edward III dalam Subarsono (2011) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh adanya empat faktor. Faktor komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Faktor sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka efektivitas implementasi menjadi terkendala. Faktor disposisi, adalah apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka tujuan kebijakan dapat tercapai. Disposisi berupa watak dan karakteristik yang dimiliki implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Faktor struktur birokrasi, bertugas mengimplementasikan kebijakan terdiri dari aspek *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi.

Pada faktor komunikasi yaitu sudah dilaksanakan oleh tiap pihak yang terkait pelaksanaan urikkes prajurit KRI Koarmada I. Baik berupa penyampaian informasi maupun koordinasi antar unit kerja yang mendukung Diskes Koarmada I dalam penyelenggaraan urikkes. Terdapat kendala berkoordinasi ketika KRI sedang berlayar.

Pada faktor sumberdaya 4 (empat) hal yang mendukung penyelenggaraan urikkes untuk prajurit pengawak KRI yaitu:

1. Staf Diskes Koarmada I sebesar 79% dari DSP (Daftar Susunan Personel) sehingga kurang sumberdaya pada saat kegiatan urikkes bersamaan dengan dukungan kesehatan kegiatan Koarmada I lainnya.
2. Informasi, terdiri dari informasi tentang:



- a. Cara melaksanakan urikkes kepada prajurit KRI. Informasi tersebut mengacu pada regulasi Perkasal Nomor 6 Tahun 2017, sudah disosialisasikan namun belum terlaksana secara menyeluruh. Pedoman informasi lainnya yaitu Buku Petunjuk Teknik Penyakit Kronis perlu diperbarui
 - b. Kepatuhan prajurit pengawak KRI terhadap perintah untuk melaksanakan urikkes sudah terlaksana tetapi ada beberapa yang menghindari urikkes dengan berbagai alasan selain sedang bertugas.
3. Wewenang, yang tertinggi ada pada Panglima Koarmada I selaku pemimpin tertinggi organisasi dan penyelenggaraan urikkes prajurit KRI Koarmada I berada di Diskes Koarmada I.

4. Sarana-prasarana

Sarana pelaksanaan urikkes berupa gedung dan alat-alat kesehatan. Gedung Diskes Koarmada I untuk urikkes strata Perwira pertama sampai dengan tamtama. Sedangkan Perwira menengah, di RS TNI AL dr. Mintohardjo. Alat-alat kesehatan memadai untuk kapasitas tertentu sehingga diperlukan alat-alat kesehatan yang baru sebagai peremajaan dan kebutuhan untuk urikkes.

Sumberdaya baik dalam teori strategi Liddel Harts maupun Lykke adalah sebagai sarana (*means*) untuk mencapai sasaran (*ends*). Sehingga perlu selalu diupayakan untuk terpenuhi agar implementasi berhasil dengan optimal.

Faktor disposisi pimpinan terhadap penyelenggaraan urikkes prajurit pengawak KRI Koarmada I terdiri dari:

1. Pengangkatan birokrasi, berupa pemilihan/penentuan personel yang kompeten dan berdedikasi, termasuk komitmen dari pimpinan TNI AL untuk mewujudkan kondisi prajurit pengawak KRI yang senantiasa siap digunakan bertugas di KRI



2. Insentif, dianggap sebagai pendorong pelaksanaan urikkes. Insentif atau kompensasi sebagai salah satu teknik pendorong agar memicu para pelaksana menjalankan perintah dengan baik (Winarno, 2005). Pemberian insentif kepada tenaga pemeriksa kesehatan secara khusus selama ini belum ada dan dianggap sudah cukup dengan adanya gaji dari pemerintah. Tidak diberikannya insentif tidak serta merta mengakibatkan tujuan pelaksanaan urikkes gagal tercapai. Karena melaksanakan pemeriksaan urikkes prajurit pengawak KRI adalah tanggung jawab moral dan profesi serta tugas pembinaan kesehatan oleh Diskes Koarmada I.

Faktor terakhir yaitu struktur birokrasi, terdapat dua karakteristik utama yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik yaitu:

1. SOP Pelaksanaan urikkes untuk prajurit pengawak KRI Koarmada I yaitu SOP Urikkes Rutin, SOP Urikkes Kemampuan Tempur dan SOP Urikkes Kesehatan Jiwa.
2. Fragmentasi (penyebaran tanggung jawab). Fragmentasi belum dipahami sebagai tanggung jawab penuh yang dipikul oleh suatu unit yang tidak terlibat secara langsung dengan urikkes. Beberapa unit menganggap urikkes adalah murni tanggung jawab dari unit Diskes Koarmada I, Depkesla RS TNI AL dr. Mintohardjo dan Diskesal. Meski demikian, alur proses yang melewati unit-unit selain Diskes secara umum dilaksanakan dengan tuntas. Diskesal sebagai pembina kesehatan TNI AL mempunyai andil besar dalam menentukan kesiapan prajurit pengawak KRI Koarmada I. Terutama dalam penyaluran anggaran urikkes yang mencukupi dan penyaluran sumber daya seperti tenaga kesehatan yang berkompeten dan pengadaan alat kesehatan yang dibutuhkan. Sejalan dengan Wahjosumidjo



(1992, p. 171) yang menyatakan kepemimpinan mempunyai peranan sentral dalam kehidupan organisasi, dimana terjadi interaksi kerjasama antar dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan.

Upaya penguatan strategi pertahanan laut melalui peningkatan kesiapan prajurit pengawak KRI di Diskes Koarmada I

Sebagai unsur kekuatan pertahanan matra laut dan penjaga wilayah kedaulatan Indonesia di laut, prajurit pengawak KRI yang profesional serta sehat fisik dan mental merupakan modal untuk meraih *command of the sea*. Hal tersebut bersifat mutlak dan tidak bisa dihindari oleh negara kepulauan seperti Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan pertahanan adalah terus menerus/sepanjang waktu, karena pertahanan merupakan keadaan siaga yang diperlukan setiap saat.

Prajurit KRI yang siap secara fisik dan mental untuk beroperasi tidak dapat dicapai tanpa adanya upaya dalam kesiapan. Untuk itu, melalui urikkes prajurit pengawak KRI di Diskes Koarmada I akan dihasilkan layak tidaknya prajurit bertugas di KRI.

Acuan peneliti dalam merumuskan upaya penguatan strategi pertahanan laut untuk meningkatkan kesiapan prajurit KRI adalah konsep strategi militer Arthur F. Lykke (1989). Lykke mengembangkan kerangka strategi dari konsep yang lebih dulu dikenalkan oleh Clausewitz dan Liddell Harts, sehingga strategi merupakan proses pengambilan keputusan terhadap elemen-elemen utama strategi secara koheren dan seimbang. Elemen-elemen itu meliputi *ends* (sasaran, *goals*, *objective*, ataupun *target*), *ways* (cara bertindak, *course of actions*, *concept*, serta metode) dan *means* (sarana, kekuatan, sumber daya, maupun potensi). Maka tujuan yang berkaitan dengan strategi pertahanan laut adalah perwujudan prajurit pengawak KRI Koarmada I yang siap siaga mendukung pertahanan laut Indonesia. Berdasarkan analisa



implementasi urikkes peneliti menentukan upaya-upaya sasaran (*ends*) sebagai berikut :

1. Terpenuhinya sumberdaya pelaksanaan urikkes (personel dan alat kesehatan).
2. Fasilitas kesehatan khusus prajurit pengawak KRI yang terlokalisir dengan dermaga sehingga prajurit KRI dapat menjangkau dengan cepat.
3. Prajurit pengawak KRI yang termotivasi penuh untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Setidaknya para awak KRI menyadari pentingnya kesiapan diri untuk mendukung kesiapan operasional KRI. Upaya yang dilakukan oleh Diskes Koarmada 1 adalah memberikan pengetahuan tentang bagaimana menjaga kesehatan dan merekomendasikan gaya hidup sehat di atas kapal.
4. Unit lain memahami dan berbagi tanggung jawab (fragmentasi) untuk mendukung urikkes prajurit pengawak KRI.

Dengan berlandaskan masukan dari informan maka cara (*Ways*) yang dilakukan :

1. Rekrutmen tenaga kesehatan dan mengajukan rencana kegiatan usulan alat kesehatan.
2. Pembentukan naval health center atau pusat layanan kesehatan untuk prajurit KRI yang terletak di dekat pangkalan/KRI bersandar.
3. Edukasi/sosialisasi materi kesehatan prajurit pengawak KRI.
4. a. Kebijakan panglima yang menekankan agar kepala satker/unit di Koarmada I yang terkait penyelenggaraan urikkes bertanggung jawab dengan memberikan dukungan sesuai dengan fungsinya.
b. Kurikulum pendidikan pertama TNI AL baik tamtama sampai perwira yang menginklusi materi pemeriksaan kesehatan bagi prajurit TNI AL



umumnya dan pengawak KRI khususnya adalah upaya pembangunan postur TNI pada bidang kekuatan pertahanan dan tanggung jawab dari kepala / perwira satker atau unit untuk mendukungnya.

Upaya-upaya di atas harus diwadahi dengan payung hukum berupa kebijakan dari pimpinan sebagai *legal standing* dan penegasan (*means*). Kebijakan urikkes untuk prajurit KRI adalah kebijakan dari atas (*top down*), sehingga membutuhkan peran dan fungsi dari leader untuk mencapai tujuan kebijakan. Namun memerlukan usulan dari satker-satker pengusul yaitu dari Diskes Koarmada I selaku ujung tombak implementor urikkes prajurit pengawak KRI.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Prajurit pengawak KRI membutuhkan kesiapan dalam melaksanakan tugas operasi pertahanan negara di laut. Urikkes prajurit pengawak KRI menjadi tolok ukur apakah prajurit dapat bertugas di KRI atau tidak. Perlu adanya upaya untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan urikkes prajurit KRI di Diskes Koarmada I, berupa menentukan sasaran (*ends*), sarana (*means*) dan cara (*ways*) yang dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan yaitu Diskes Koarmada I secara optimal melaksanakan urikkes untuk mendapatkan prajurit pengawak KRI yang siap secara fisik dan mental bertugas operasi pertahanan negara di laut.

Rekomendasi

Sebagai rekomendasi yang diberikan oleh peneliti adalah:

- a. Perlunya dimasukkan pada petunjuk kerja kasatker di Koarmada I untuk bertanggung jawab memberikan dukungan dan bersinergi dengan satker lain pada pelaksanaan urikkes serta mengawasi anggotanya dalam



- melaksanakan urikkes. Termasuk perlu adanya kebijakan Panglima Koarmada I mewajibkan seluruh anggota KRI untuk melaksanakan urikkes dan tindak lanjutnya tanpa terkecuali.
- b. Perlunya Diskesal memberi saran ke Disdikal supaya di kurikulum pendidikan pertama TNI AL baik di AAL maupun di Kodiklatal memasukkan materi pemeriksaan kesehatan bagi prajurit TNI AL umumnya dan pengawak KRI khususnya adalah upaya pembangunan postur TNI AL pada bidang kekuatan pertahanan di laut.
 - c. Perlunya Diskesal merancang pembentukan layanan kesehatan dengan konsep pemeriksaan kesehatan untuk prajurit/awak KRI yang ideal dan terlokalisir dengan dermaga.
 - d. Perlunya Diskesal merevisi buku petunjuk teknik penyakit kronis yang sudah lebih dari 10 tahun sehingga lebih relevan dengan kondisi sekarang.
 - e. Perlunya Diskes Koarmada I berkoordinasi dengan Satuan Kapal dan Komandan KRI untuk membuat SOP penanganan prajurit sakit di KRI.

Daftar Pustaka

- Adriyanto, A., & Muchlis, N. (2017). Pengaruh lingkungan kerja, kesejahteraan, dan kepemimpinan komandan KRI terhadap motivasi kerja prajurit pengawak KRI di Satkor Koarmatim. *Prodi Strategi Pertahanan Laut, Vol. 3*, hh. 1-3.
- Arthur F. Lykke Jr. (1989, May). Defining Military Strategy. *Military Review, May*.
- Bungin, B. (2008). *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial* (2nd ed.). Kencana.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design* (4th ed.). SAGE Publications.
- Ma'arif, S. (2015). Prajurit Profesional-Patriot: Menuju TNI Profesional pada



- Era Reformasi. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 19(2), 257–286.
<https://doi.org/10.7454/mjs.v19i2.4704>
- Margono, Y. (2019). Membangun Kekuatan Indonesia Barat di Wilayah Kawasan Indonesia Barat. *Cakrawala*, 36–39.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis : A method sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Rizanny, D. (n.d.). *Mengapa Angkatan Laut Berbeda*. Academia.Edu.
https://www.academia.edu/36189567/MENGAPA_ANGKATAN_LAUT_BERBEDA
- Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.
- Supriyatno, M. (2014). *Tentang ilmu pertahanan* (1st ed.). pustaka obor.
- Winarno, B. (2005). *Kebijakan publik teori dan proses*. Media Pressindo.
- Yusuf, M. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan penelitian gabungan*. Prenada Media Grup.